



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)  
**UNIT KERJA** : KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : HENDI KURNIADI  
2. Jabatan : ANGGOTA  
3. NHK : 984724

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp.** **1.452.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 184 m2/120 m2 di KAB / KOTA KOTA SUNGAI PENUH, Rp. 580.000.000  
2. Tanah dan Bangunan Seluas 357 m2/160 m2 di KAB / KOTA KOTA SUNGAI PENUH, Rp. 385.000.000  
3. Tanah Seluas 100 m2 di KAB / KOTA KOTA SUNGAI PENUH, Rp. 45.000.000  
4. Tanah Seluas 40 m2 di KAB / KOTA KOTA SUNGAI PENUH, Rp. 25.000.000  
5. Tanah Seluas 100 m2 di KAB / KOTA KOTA SUNGAI PENUH, Rp. 35.000.000  
6. Tanah Seluas 195 m2 di KAB / KOTA KOTA SUNGAI PENUH, Rp. 50.000.000  
7. Tanah Seluas 157 m2 di KAB / KOTA KOTA SUNGAI PENUH, Rp. 85.000.000  
8. Tanah dan Bangunan Seluas 104 m2/36 m2 di KAB / KOTA MUARO JAMBI, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000  
9. Tanah Seluas 20.000 m2 di KAB / KOTA KERINCI, HASIL SENDIRI Rp. 97.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** **Rp.** **8.000.000**



1. MOTOR, YAMAHA SOLO Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp.  
8.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 9.400.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 1.249.387

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.470.649.387

III. HUTANG Rp. 480.713.245

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 989.936.142

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.